

Analisis Kurikulum PPKn Pada Pendidikan Menengah

Novian Bagaskoro¹, Erna Mustika Rini², Mohamad Subkhan³

^{1,2,3}STKIP Arrahmaniyyah Depok

nbk111999@gmail.com¹, ernafikadino@gmail.com², muhamadsubkhan212@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the Pancasila and Citizenship Education (PPKN) curriculum at the secondary education level in Indonesia. The PPKN curriculum plays a strategic role in shaping students' character and national awareness in the era of globalization. The research method used is a literature study by analyzing various literature sources, curriculum documents, and previous research. The results show that the PPKN curriculum in secondary education has undergone a significant transformation from a content-based curriculum to a competency-based curriculum that emphasizes character building, constitutional awareness, and citizenship skills. However, curriculum implementation still faces various challenges such as limited innovative learning methods, minimal technology integration, and gaps in teachers' understanding of the essence of PPKN learning. This study recommends the need to increase teacher capacity, develop interactive learning media, and strengthen collaboration between schools and communities to optimize the achievement of PPKN learning objectives.

Keywords:

PPKN Curriculum,
Secondary Education,
Character Education,
Citizenship

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) pada jenjang pendidikan menengah di Indonesia. Kurikulum PPKN memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran berbangsa siswa di era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber literatur, dokumen kurikulum, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum PPKN pada pendidikan menengah telah mengalami transformasi signifikan dari kurikulum berbasis konten menuju kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pembentukan karakter, kesadaran konstitusional, dan keterampilan kewarganegaraan. Namun, implementasi kurikulum masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan metode pembelajaran yang inovatif, minimnya integrasi teknologi, dan kesenjangan pemahaman guru terhadap esensi pembelajaran PPKN. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas guru, pengembangan media pembelajaran interaktif, dan penguatan kolaborasi antara sekolah dengan masyarakat untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran PPKN.

Corresponding Author:

Novian Bagaskoro
STKIP Arrahmaniyyah Depok
Email: nbk111999@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) merupakan mata pelajaran yang memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia (Sulistianingsih et al., 2024). Sebagai wahana pendidikan karakter dan pembentukan kesadaran berbangsa, PPKN memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila (Sofyan et al., 2025). Pada jenjang pendidikan menengah,

baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA), PPKN berperan penting dalam fase perkembangan identitas remaja yang sedang mencari jati diri dan membangun pemahaman tentang perannya sebagai warga negara (Sobri et al., 2019).

Kurikulum PPKN di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Sila & Dwijendra, 2024). Sejak era kemerdekaan hingga saat ini, kurikulum PPKN telah bertransformasi dari pendekatan indoktrinasi menuju pembelajaran yang lebih demokratis dan partisipatif (Ramadhan et al., 2024). Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan kewarganegaraan dengan tuntutan era modern yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan kompleksitas permasalahan sosial-politik (Sari & Yanto, 2025). Kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Ilmawan, 2024).

Pentingnya menganalisis kurikulum PPKN pada pendidikan menengah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor krusial (Basit et al., 2023). Pertama, pendidikan menengah merupakan masa transisi penting dalam perkembangan kognitif dan moral siswa (Leny Leny, 2024). Pada fase ini, siswa mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan kritis yang memungkinkan mereka memahami konsep-konsep kompleks tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Kedua, siswa pendidikan menengah berada pada usia yang rentan terhadap pengaruh negatif dari luar, termasuk radikalisme, intoleransi, dan degradasi moral (Listyorini et al., 2022). PPKN menjadi benteng pertahanan untuk membentengi mereka dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Ketiga, era digital dan globalisasi membawa tantangan baru bagi pendidikan kewarganegaraan. Siswa saat ini terpapar dengan arus informasi yang sangat masif dari berbagai sumber yang tidak selalu terpercaya. Mereka perlu dibekali dengan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis untuk dapat memilah informasi yang benar dan menyaring konten-konten yang berpotensi merusak (Aulita et al., 2024). PPKN harus mampu menjawab tantangan ini dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dan metode pembelajaran yang *engaging* bagi generasi *digital native*.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam implementasi kurikulum PPKN. Pertama, masih terdapat kecenderungan pembelajaran yang bersifat *teacher-centered* dan fokus pada hafalan materi dibandingkan penguatan nilai dan praktik kewarganegaraan. Kedua, terdapat kesenjangan antara kurikulum ideal (*intended curriculum*) dengan kurikulum yang diimplementasikan (*implemented curriculum*) dan kurikulum yang benar-benar dipelajari siswa (*achieved curriculum*). Ketiga, keterbatasan kompetensi guru dalam menggunakan metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran (Ginjar et al., 2024).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah evaluasi pembelajaran PPKN yang cenderung masih berfokus pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik yang justru menjadi esensi dari pendidikan kewarganegaraan belum dinilai secara komprehensif (Chodariyah & Wibawa, 2024). Padahal, tujuan utama PPKN adalah membentuk warga negara yang tidak hanya tahu tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memerlukan instrumen penilaian yang holistik dan autentik (Isa Azizah Ramadhani et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kurikulum PPKN pada pendidikan menengah saat ini. Analisis yang mendalam terhadap struktur kurikulum, konten pembelajaran, metode penyampaian, dan sistem evaluasi akan memberikan masukan berharga bagi pengambil kebijakan, praktisi pendidikan, dan *stakeholder* lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum yang ada serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang, sehingga PPKN dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berakarakter, berintegritas, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis kurikulum PPKN pada pendidikan menengah. Metode kepustakaan dipilih karena memberikan kesempatan untuk melakukan kajian mendalam terhadap berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Amelia et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman komprehensif tentang perkembangan, implementasi, dan tantangan kurikulum PPKN tanpa terbatas pada satu konteks atau lokasi tertentu (Nugraha, 2025). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum, buku pedoman kurikulum PPKN, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) PPKN untuk jenjang SMP dan SMA, serta dokumen Kurikulum Merdeka. Data sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah nasional dan

internasional, hasil penelitian, artikel prosiding seminar, dan laporan evaluasi implementasi kurikulum PPKN dari berbagai sumber terpercaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti *Google Scholar*, Portal Garuda, dan perpustakaan digital institusi pendidikan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "kurikulum PPKN", "pendidikan kewarganegaraan", "pendidikan menengah", "Kurikulum Merdeka", "pendidikan karakter", dan kombinasi dari kata kunci tersebut. Kriteria inklusi literatur yang digunakan mencakup relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi yang diutamakan dari tahun 2015 hingga saat ini untuk mendapatkan informasi yang terkini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Proses analisis dimulai dengan mengorganisasi dan mengategorisasi data berdasarkan tema-tema utama seperti struktur kurikulum, tujuan pembelajaran, materi/konten, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem evaluasi. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan berbagai perspektif dan temuan dari literatur yang berbeda. Analisis kritis juga dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam kurikulum PPKN. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur dan dokumen. Peneliti juga menerapkan prinsip kritik sumber untuk menilai kredibilitas dan objektivitas setiap literatur yang digunakan. Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis untuk memastikan dapat diverifikasi dan di replikasi oleh peneliti lain yang tertarik dengan topik serupa.

3. PEMBAHASAN

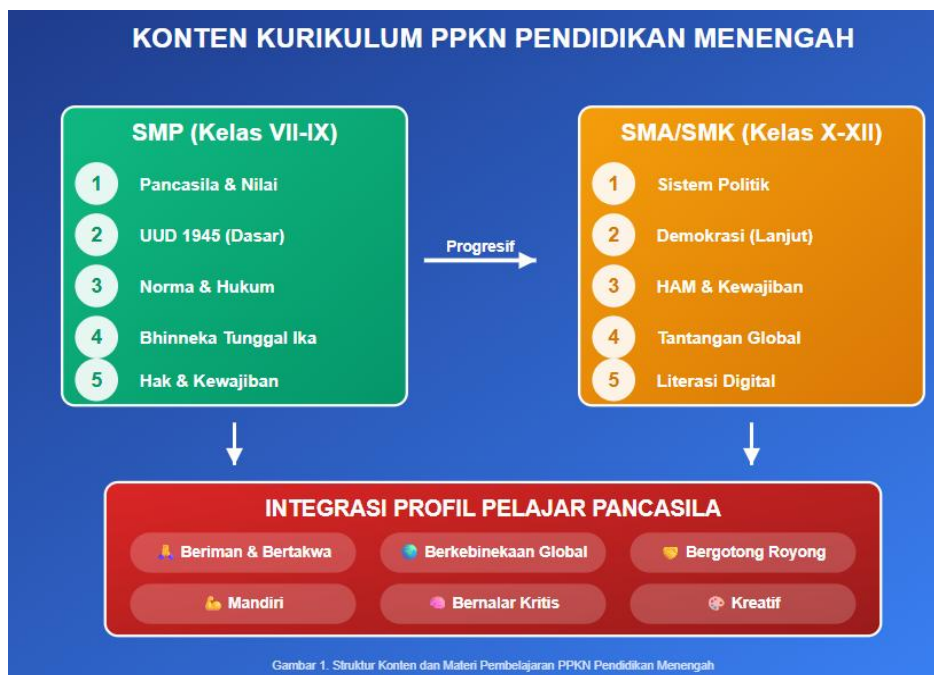
a. Struktur dan Komponen Kurikulum PPKN

Hasil analisis menunjukkan bahwa kurikulum PPKN pada pendidikan menengah memiliki struktur yang komprehensif dengan beberapa komponen utama. Pada tingkat SMP, alokasi waktu untuk mata pelajaran PPKN adalah 3 jam pelajaran per minggu, sedangkan pada tingkat SMA/SMK mendapat alokasi yang sama. Struktur kurikulum dirancang berdasarkan empat pilar utama: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum PPKN mencakup tiga dimensi utama: dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), dimensi sikap dan nilai kewarganegaraan (*civic disposition*), dan dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Ketiga dimensi ini dirancang untuk membentuk warga negara yang cerdas, baik, dan bertanggung jawab. Dalam Kurikulum Merdeka, penekanan lebih diberikan pada Profil Pelajar Pancasila yang mencakup enam dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

b. Konten dan Materi Pembelajaran

Konten kurikulum PPKN pada pendidikan menengah telah mengalami evolusi signifikan. Pada jenjang SMP, materi pembelajaran mencakup topik-topik fundamental seperti pemahaman norma dan nilai Pancasila, sistem hukum dan peradilan, Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban warga negara, serta kebhinekaan dan toleransi. Pada jenjang SMA/SMK, materi dikembangkan lebih kompleks dengan mencakup sistem politik Indonesia, demokrasi dan partisipasi kewarganegaraan, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, serta tantangan kewarganegaraan di era digital.



Salah satu perubahan penting adalah penambahan materi tentang literasi digital dan kewarganegaraan digital (*digital citizenship*). Hal ini merespons fenomena hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme di media sosial yang menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Siswa dibekali dengan kemampuan untuk menjadi netizen yang bijak, kritis terhadap informasi, dan menjunjung tinggi etika digital.

c. Metode dan Strategi Pembelajaran

Analisis terhadap metode pembelajaran menunjukkan adanya pergeseran dari pembelajaran konvensional menuju pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif. Metode-metode yang direkomendasikan dalam kurikulum PPKN meliputi: pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), pembelajaran kooperatif, simulasi dan *role-playing*, diskusi dan debat, serta pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa.

Namun, studi literatur menunjukkan bahwa implementasi metode-metode inovatif ini masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar guru masih cenderung menggunakan metode ceramah dan tanya jawab konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan waktu, jumlah siswa yang besar dalam satu kelas, keterbatasan pemahaman guru tentang metode pembelajaran inovatif, dan budaya belajar siswa yang masih pasif.

d. Media dan Teknologi Pembelajaran

Kurikulum PPKN mendorong penggunaan media pembelajaran yang variatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Media yang dapat digunakan meliputi media visual (gambar, poster, infografis), media audio-visual (video, film dokumenter), media interaktif (game edukasi, simulasi digital), serta pemanfaatan platform pembelajaran daring. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, teknologi digital diintegrasikan lebih intensif melalui platform seperti *Learning Management System* (LMS), aplikasi pembelajaran, dan sumber belajar digital (Rahayu et al., 2022).

e. Sistem Evaluasi dan Penilaian

Sistem penilaian dalam kurikulum PPKN telah berkembang dari penilaian yang hanya fokus pada aspek kognitif menuju penilaian autentik yang mencakup tiga ranah: pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*). Instrumen penilaian yang digunakan meliputi tes tertulis, penilaian proyek, penilaian portofolio, observasi sikap, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Namun, literatur menunjukkan bahwa implementasi penilaian autentik, terutama untuk aspek sikap dan keterampilan kewarganegaraan, masih menjadi tantangan bagi sebagian besar guru (Amir & Nugraha, 2023).

f. Tantangan dan Peluang

Penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi kurikulum PPKN: (1) kesenjangan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran inovatif; (2) keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal); (3) minimnya kolaborasi antara sekolah

dengan komunitas dalam pembelajaran PPKN; (4) stigma bahwa PPKN adalah mata pelajaran hafalan yang membosankan; dan (5) tantangan menjaga relevansi materi dengan dinamika perkembangan sosial-politik yang sangat cepat. Di sisi lain, terdapat berbagai peluang untuk mengoptimalkan pendidikan PPKN, antara lain: pemanfaatan teknologi digital yang semakin aksesibel, meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter, dukungan kebijakan pemerintah melalui Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, serta potensi kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintah dalam menciptakan ekosistem pembelajaran kewarganegaraan yang lebih kaya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa kurikulum PPKN pada pendidikan menengah telah mengalami transformasi signifikan menuju paradigma pembelajaran yang lebih demokratis, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Struktur kurikulum yang dibangun di atas empat pilar kebangsaan dengan mengintegrasikan Profil Pelajar Pancasila menunjukkan upaya sistematis dalam membentuk warga negara yang berkarakter. Konten pembelajaran juga telah berkembang mencakup isu-isu kontemporer seperti literasi digital dan kewarganegaraan global.

Namun, implementasi kurikulum ideal masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam hal kompetensi guru, ketersediaan sarana-prasarana, dan transformasi budaya pembelajaran. Kesenjangan antara kurikulum yang dirancang dengan yang benar-benar terjadi di kelas masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Metode pembelajaran yang inovatif dan penilaian autentik yang komprehensif belum sepenuhnya terimplementasi secara merata di seluruh satuan pendidikan.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan PPKN, diperlukan upaya-upaya strategis berupa: peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan media pembelajaran digital yang interaktif dan *engaging*, penguatan kolaborasi antara sekolah dengan masyarakat, serta evaluasi dan penyempurnaan kurikulum secara berkala berdasarkan umpan balik dari praktik di lapangan. Dengan upaya-upaya tersebut, PPKN dapat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam membentuk generasi muda Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat, kesadaran berbangsa yang tinggi, dan komitmen untuk berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

REFERENSI

- Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., Setiaji, B., & Dharta, F. Y. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Amir, M., & Nugraha, D. (2023). Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Akibat Efek Penggunaan Model Pembelajaran Flipped Classroom Dan Mind Mapping. *JIPMuktj: Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 4(2), 69. <https://jurnal.pcmkramatjati.or.id/index.php/JIPMUKJT/index>
- Aulita, D., Nurazizah, F., Meilinda, L., & Nugraha, D. (2024). Social Media As Source Study Generation Millennials. *Journal Economic and Economic Education*, 1(1), 36–40.
- Basit, A., Sapriya, S., Komalasari, K., & Rahmat, R. (2023). Implementasi Model Project Based Learning Dalam Meningkatkan Keterampilan Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 10(2), 216–223. <https://doi.org/10.36706/jbti.v10i2.20870>
- Chodariyah, D. E. N., & Wibawa, S. (2024). PENGEMBANGAN MODEL PROJECT-BASED LEARNING BERBASIS APLIKASI CANVA UNTUK PEMBELAJARAN PKN KELAS 1 SD NEGERI MUNTILAN. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4), 9–21.
- Ginanjar, D., Firman, M., Sunandi, I., Purnama, W. W., & Maharani, N. (2024). Evolusi Pendidikan Kewarganegaraan: dari Pendekatan Berbasis Pengetahuan ke Perspektif yang Lebih Luas. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(4), 57–64. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3263>
- Ilmawan, D. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 820–828. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10546>
- Isa Azizah Ramadhani, Riovaldi Paruntungan Silalahi, Stefie Yuliandra, Nirindah Daniella Sembiring, Frisca Adelia Stevani, Syahla Pridehan, Muhammad Faqih Al-Anshari, Velissa Maharani, & Dimas Dimyati. (2023). Implementasi Teknologi Dalam Pendidikan Pada Pembelajaran Hybrid Di Sekolah SMP Negeri 85 Jakarta Dan SMA Negeri 34 Jakarta. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(1), 103–118. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i1.3049>
- Leny Leny. (2024). Mengembangkan Karakter Peserta Didik yang sesuai Profil Pelajar Pancasila melalui

- Implementasi Kurikulum Merdeka. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 3(1), 343–350. <https://doi.org/10.55606/lencana.v3i1.4585>
- Listyorini, D., Saputra, A., & Andraini, F. (2022). PENERAPAN PENDIDIKAN HUKUM PADA SISWA SMA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SEMARANG. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(Vol. 10. No. 1), 353–361.
- Nugraha, D. (2025). *METODOLOGI PENELITIAN: TEORI DAN PRAKTIK* (N. Mayasari (ed.)). Penerbit Widina Media Utama.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877–5889. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230>
- Ramadhan, I., Mahastuti, C., Eriranda, A. O., & Marwan, M. (2024). Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Perancang Pembelajaran Antikorupsi. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 37–47. <https://journal1.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/view/901/629>
- Sari, P. I., & Yanto, S. (2025). Efektivitas Model Pembelajaran Blended Project-Based Learning Berbasis Kearifan Lokal terhadap Penguatan Karakter dan Kompetensi Kewarganegaraan Digital Siswa SMA. *Civic Education Perspective Journal*, 5(1), 1–10.
- Sila, I. M., & Dwijendra, U. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Reseacrh*, 2(1), 8–14.
- Sobri, M., Nursaptini, N., Widodo, A., & Sutisna, D. (2019). Pembentukan karakter disiplin siswa melalui kultur sekolah. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(1), 61–71. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i1.26912>
- Sofyan, S., Kurniawan, M. B., Octarina, H., Sahusilawane, N. A., Safira, A., Sulastri, T., & Yusnaldi, E. (2025). Kesadaran Sosial Melalui Pembelajaran IPS Sekolah Dasar. *JURNAL MUDABBIR: Journal Research and Education Studies*, 5(1), 258–268. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>
- Sulistianingsih, S., Ajung, A., Alkani, S., & Kasih, R. (2024). Strategi Penguatan Karakter Demokratis Melalui Pembelajaran PPKn Berbasis Proyek. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 821–834. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2055>